



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 6 Nomor 4, 2023  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/11/2023  
 Reviewed : 02/12/2023  
 Accepted : 10/12/2023  
 Published : 13/12/2023

Roni Indra Partini<sup>1</sup>  
 Syafni Nurti<sup>2</sup>  
 Fadriati<sup>3</sup>

## ANALISIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG DESENTRALISASI PENDIDIKAN

### Abstrak

Pendidikan sangat penting dalam kecerdasan manusia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model analisis kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kebijakan pendidikan. Pendidikan Juga merupakan bagian tak terpisahkan dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti halnya kesejahteraan ekonomi dan kesehatan. Pembangunan sekolah masuk dalam ranah kebutuhan rakyat karena masuk dalam fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Perkembangan yang terjadi di SD Negeri 20 Timbulun tidak lebih baik dibandingkan dengan di SD lainnya. Hal ini cenderung mengalami penurunan setelah terjadinya peningkatan. Hal ini memvisualisasikan terjadinya ketidak stabilan pembangunan fasilitas SD Negeri 20 Timbulun. Selain itu beberapa SD Negeri 20 Timbulu letaknya berada di dusun. Selain lokasinya yang berjauhan dengan ibu kota kabupaten, beberapa sekolah dasar pun masih menggunakan jasa para personel TNI untuk melakukan aktivitas pembelajaran dikarenakan masih minimnya tenaga pengajar. Sejatinnya, terdapat berbagai bidang yang menjadi kewenangan dalam desentralisasi pendidikan di daerah, Dekat sekolah tersebut salah satunya yakni bidang pengembangan Sumberdaya Manusia. Banya.. Tidak semua pendidik mampu dan siap untuk menjalankan tugasnya untuk mendidik, terlebih pada kawasan perbatasan. Itu sebabnya

**Kata Kunci:** Analisis, Dampak Kebijakan, Desentralisasi Pendidikan

### Abstract

Education is very important in human intelligence. This article aims to describe the educational policy analysis model. This research uses a qualitative approach in literature study. The research results show that the education policy model. Education is also an inseparable part and is always in direct contact with society, such as economic welfare and health. School construction falls within the realm of people's needs because it is included in public facilities which are widely used for scientific needs. The development that occurred at SD Negeri 20 Timbulun was no better than other elementary schools. This tends to decrease after an increase. This visualizes the instability in the construction of SD Negeri 20 Timbulun facilities. Apart from that, several SD Negeri 20 Timbulu are located in hamlets. Apart from being located far from the district capital, several elementary schools still use the services of TNI personnel to carry out learning activities due to the lack of teaching staff. In fact, there are various fields that are the authority in the decentralization of education in the regions. Near schools, one of them is the field of human resource development. Banya... Not all educators are able and ready to carry out their duties to educate, especially in border areas. That is why

**Keywords:** Analysis, Policy Impact, Decentralization of Education

### PENDAHULUAN

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan.

<sup>1,2,3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar  
 email: roniindrapartini@gmail.com

Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini pemerintah juga tidak serius dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dengan adanya salah satu peraturan yang mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 (Iskandar, 2019; Suhono & Sari, 2020; Irianisyah, 2020). Dalam hal ini jelas terlihat bahwa pendidikan dipengaruhi oleh hasil dari suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat (Costantina, 2018). Dalam hal ini, kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Dunn 2003). Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik (Darwis 2013). Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada

Kebijakan sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah serta perilaku pada umumnya. Makna kebijakan juga sering dikonotasikan dengan sebagai politik karena membawa konsekuensi politis dan perilaku politik. Dengan makna lain kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Menurut Lester dan Stewart, studi kebijakan publik kini telah meliputi berbagai tahap seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan publik (*public cycle*) yang meliputi tahapan yaitu 1) agenda setting, policy formulation, 3) policy implementation, 4) policy evaluation, 5) policy change, dan 6) policy termination (Lester & Stewart, 2000; Arlita dkk., 2020). Sementara menurut Dunn tahap dalam melakukan policy melalui lima langkah yaitu 1) penyusunan agenda, 2) melalui formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, 5) penilaian/ evaluasi kebijakan (Dunn, 2003). Kelima tahapan ini menjadi berurutan secara hirarkhi, kesemuanya tahapan perlu dikelola dan dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Langkah-langkah membuat kebijakan di atas memberikan makna bahwa sebuah kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan melalui sebuah proses yang perencanaan, implementasi dan evaluasi (B., 2008.).

Dengan adanya desentralisasi pendidikan akan memperkuat pemerintah daerah membangun kapital sosial pada pemerintah daerah. Karena penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa wewenang paling besar untuk sektor pendidikan sejak pendidikan pra sekolah sampai pendidikan menengah atas adalah urusan pemerintah kabupaten atau kota. Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan munculnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2). Selanjutnya, kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan (pasal 9). Demikian juga tentang pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Dalam konteks inilah Pendidikan di daerah benar-benar memberikan dasar yang cukup bagi daerah untuk lebih memberdayakan dalam arti lebih fungsional, memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan tidak hanya sekedar menjadi retorika. (Munir, 2010)

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka Upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, dan Tilaar, 1994: 40). Lebih lanjut Suryadi, dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemcahan masalah kebijakan.

Kebijakan desentralisasi pendidikan adalah perubahan dalam sistem manajemen dan pengelolaan pendidikan yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan di wilayahnya. Perubahan ini berawal dari otonomi daerah yang

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pendidikan di tingkat lokal (Surya, 2002).

Namun, dampak dari kebijakan desentralisasi pendidikan ini telah menjadi topik perdebatan yang panjang. Beberapa pihak berpendapat bahwa desentralisasi pendidikan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan, meningkatkan akuntabilitas, dan lebih mendekatkan pengambilan keputusan kepada kebutuhan lokal. Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan, bahwasannya desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menemukan dan mengelola potensi yang ada di daerah masing-masing, namun tidak sepenuhnya terlepas dari kontrol pemerintah pusat.

Realita kini, kebijakan tidak didasari oleh kelima nilai di atas, maka ini menjadi sebuah pengingat bagi peneliti sebagai praktisi serta pemangku kebijakan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan melalui formulasi kebijakan yang baik. Berdasarkan kajian terdahulu, konsep analisis kebijakan digambarkan secara umum dalam berbagai disiplin bidang ilmu pengetahuan (Bintari dkk., 2016). Perlu adanya fokus pembahasan mengenai pendidikan secara khusus. Analisis model kebijakan sangat penting untuk difahami agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengantarkan keberhasilan tujuan pendidikan. Terdapat berbagai model formulasi kebijakan dalam pendidikan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dengan demikian, penulis merasa penting untuk menuangkan artikel yang berjudul tentang model Analisis kebijakan pendidikan, agar dapat memahami berbagai model yang ada dan dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Model penelitian ini menggunakan library research, dengan analisis inductive deduktif yang berasal dari beberapa analisis literature (O'Dwyer & Bernauer, 2013; Moser & Korstjens, 2018). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research) sebagai proses understanding dari data teks tersebut, penulis kemudian menginterpretasikannya menggunakan metode deskripsi analisis, yakni dimulai dengan pengumpulan data secara sistematis dan konsisten, yang kemudian dianalisis, diseleksi serta digabungkan untuk kemudian diambil kesimpulan menggunakan analisis yang deduktif, dari masalah yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus. Sedangkan sumber data yang dipergunakan yaitu data primer sebagai penguat dan pelengkap data-data yang dirasa valid dan data sekunder yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dalam judul penelitian. Sumber data yang digunakan adalah berasal dari Jurnal dan buku diantaranya di tulis oleh Azis dkk., 2017. dkk., 2019, Parsons, Wayne. 2006, Sabri dkk., 2013, Muhdi dkk., 2017, dan sumber lainnya yang relevan. Sedangkan metode analisis dan interpretasi data yang digunakan oleh peneliti mengacu pada langkah-langkah analisis yang diajukan oleh Creswell (2016), Pertama, Memproses dan menyiapkan data untuk ditinjau; Kedua, membaca seluruh data; Ketiga, Mulai mengkode semua data penelitian; Keempat, mendeskripsikan kategori dan pengaturan tema yang akan dianalisis; Kelima, Menyajikan laporan naratif kualitatif, dan Keenam, Membuat interpretasi dalam penelitian kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Salah satu program yang menjadi perwujudan daripada regulasi tersebut adalah dengan pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun (Yosada, 2016). Bahkan di beberapa daerah mempunyai kebijakan pendidikan

hingga 12 tahun. Kebijakan desentralisasi memiliki tujuan mulia yakni agar pemerintah pusat dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi-fungsi pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat (Muhammad, 2016). Penulis berpendapat bahwasannya ketika kebijakan desentralisasi dilaksanakan maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seharusnya lebih maksimal. Akan tetapi kebijakan wajib belajar tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal apabila fasilitas penunjang pembelajaran tidak mendukung. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa salah satu kendala dalam mewujudkan desentralisasi yang baik ialah sarana dan prasarana di SD Negeri 20 Timbulun yang belum memadai (Maisyanah, 2018)

Pendidikan ialah bagian tak terpisahkan dan selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti halnya kesejahteraan ekonomi dan kesehatan (Fatkhuri, 2019). Pembangunan sekolah masuk dalam ranah kebutuhan rakyat karena masuk dalam fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Perkembangan yang terjadi di SD Negeri 20 Timbulun tidak lebih baik dibandingkan dengan di SD lainnya. Hal ini cenderung mengalami penurunan setelah terjadinya peningkatan. Hal ini memvisualisasikan terjadinya ketidak stabilan pembangunan fasilitas SD Negeri 20 Timbulun. Selain itu beberapa SD Negeri 20 Timbulu letaknya berada di dusun. Selain lokasinya yang berjauhan dengan ibu kota kabupaten, beberapa sekolah dasar pun masih menggunakan jasa para personel TNI untuk melakukan aktivitas pembelajaran dikarenakan masih minimnya tenaga pengajar. Sejatinya, terdapat berbagai bidang yang menjadi kewenangan dalam desentralisasi pendidikan di daerah, Dekat sekolah tersebut salah satunya yakni bidang pengembangan Sumberdaya Manusia. Banya.. Tidak semua pendidik mampu dan siap untuk menjalankan tugasnya untuk mendidik, terlebih pada kawasan perbatasan. Itu sebabnya.

**Dampak Globalisasi dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia yaitu** Perkembangan dunia pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun 4 non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Ketidaksiapan bangsa kita dalam mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan Dampak positif dan negatif dari dari pengaruh globalisasi dalam pendidikan dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Dampak Positif Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan Indonesia (Pengajaran Interaktif Multimedia)

Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi, merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan computer. Apabila dulu, guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada computer. Sehingga tulisan, film, suara, music, gambar hidup, dapat digabungkan menjadi suatu proses komunikasi.

Dalam fenomena balon atau pegas, dapat terlihat bahwa daya itu dapat mengubah bentuk sebuah objek. Dulu, ketika seorang guru berbicara tentang bagaimana daya dapat mengubah bentuk sebuah objek tanpa bantuan multimedia, para siswa mungkin tidak langsung menangkapnya. Sang guru tentu akan menjelaskan dengan contoh-contoh, tetapi mendengar tak seefektif melihat. Levie dan Levie (1975) dalam Arsyad (2005) yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus kata, visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan-fakta dengan konsep.

2. Dampak Negatif Globalisasi Terhadap Dunia Pendidikan Indonesia
  - a. Komersialisasi Pendidikan

Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Micklethwait menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya “Masa Depan Sempurna” bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Salah satu ciri utamanya ialah semangat menguji murid ala Victoria yang bisa menyenangkan Mr. Gradgrind dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil, bukan hanya bagi murid, tapi juga pemegang saham.(John Micklethwait, 2007:166).

b. Bahaya Dunia Maya

Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negative bagi siswa. Terdapat pula, Aneka macam materi yang berpengaruh negative bertebaran di internet. Misalnya: pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedafolia, dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapa pun, termasuk siswa. Barang-barang seperti viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Contohnya, 6 Oktober 2009 lalu diberitakan salah seorang siswi SMA di Jawa Timur pergi meninggalkan sekolah demi menemui seorang lelaki yang dia kenal melalui situs pertemanan “facebook”. Hal ini sangat berbahaya pada proses belajar mengajar (Madjid, 2018).

c. Ketergantungan

Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti computer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa ataupun guru. Sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat alat tersebut.

d. Paradigma Pendidikan Nasional yang Sekular-Materialistik

Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi : Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, kagamaan, dan khusus dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia yang sholeh yang berkepribadian sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institusi agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan seluruh aspek.

Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan ilmu agama. Banyak lulusan pendidikan umum yang ‘buta agama’ dan rapuh kepribadiannya. Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai ilmu agama dan kepribadiannya pun bagus, tetapi buta dari segi sains dan teknologi. Sehingga, sektor-sektor modern diisi orang-orang awam. Sedang yang mengerti agama membuat dunianya sendiri, karena tidak mampu terjun ke sektor modern.

e. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal, itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahal biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahal biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), dimana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Namun dalam penggunaan dana, tidak transparan. Karena komite sekolah adalah orang-orang dekat kepada sekolah.

f. Kualitas SDM yang Rendah

Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular-materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun 8 sangat jauh jika dibandingkan dengan Negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah Negara dengan segudang masalah (kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah), ternyata kualitas SDM Indonesia sangat jauh tertinggal. India dapat menghasilkan kualitas SDM yang mencengangkan. Jika Indonesia masih dibayangkan pengusiran dan pemerkosaan tenaga kerja tak terdidik yang dikirim ke luar negeri, banyak orang India mendapat posisi bergengsi di pasar Internasional.

Di samping kualitas SDM yang rendah juga disebabkan di beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan guru, dan ini perlu segera diantisipasi. Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan formal yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan non formal.

3. Penyesuaian Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi

Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita yaitu menghasilkan SDM yang kompetitif

Yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning (pandangan), repositioning strategy (strategi), dan leadership (kepemimpinan). Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2020 bukan tidak mungkin Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi.

## SIMPULAN

Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerahnya. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pendidikan, serta untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah memiliki ruang lingkup yang meliputi berbagai aspek, seperti peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah, alokasi dan distribusi anggaran, kriteria dan indikator mutu, rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum dan metode pembelajaran, serta sistem evaluasi dan akreditasi. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah juga menghadapi berbagai tantangan dan masalah, seperti perbenturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, kurangnya profesionalisme, koordinasi, dan pengawasan dari pemerintah pusat,

ketimpangan kualitas dan kesetaraan pendidikan antar daerah, serta rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi, merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan computer. Perubahan Corak Pendidikan, mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan.

Reformasi pendidikan adalah upaya perbaikan pada bidang pendidikan. Reformasi pendidikan memiliki dua karakteristik dasar yaitu terprogram dan sistemik. Reformasi pendidikan yang terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi pendidikan. Yang termasuk ke dalam reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi adalah memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam proses pendidikan agar terjadi perubahan secara kontras dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Sedangkan reformasi sistemik berkaitan dengan adanya hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan.

Mutu pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan yang ada di Indonesia, oleh karena itu mutu pendidikan harus senantiasa ditingkatkan dengan cara memperkuat jalannya MBS. Implementasi MBS sebaiknya dilakukan dengan cermat dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi MBS.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting yang diperhatikan dalam pembangunan negara. Pendidikan juga dianggap sebagai faktor yang berperan dalam menentukan perkembangan sosial ekonomi, keilmuan, serta teknologi. Dengan kata lain, target pertumbuhan dan pembangunan dari setiap negara haruslah didahului oleh perencanaan pendidikan yang baik. Maka dari itu, untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan baik maka diperlukan guru yang berkualitas.

Pembinaan guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru, pemberian kompensasi dan kemampuan mengembangkan profesionalitas guru dalam bidang pekerjaan, adanya bimbingan dari kepala madrasah/kepala sekolah dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam perkembangan IPTEKS. Sehingga dengan hal ini, dapat membantu dalam meningkatkan kinerja guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- B., A. (2008.). *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ariana Syafty Bugis, Refian Body, and Toto Andayono, 'Persepsi Guru Terhadap Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 4 Pariyaman', *Cived: Journal Of Civil Engineering and Vocational Education*, 5.3 (2018), 1-5
- Arlita, S. E., Ahyani, N., & Missriani, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Akademik dan Motivasi Guru Terhadap Kinerja Guru. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(3), 8-14. Google Scholar
- Azis, A. (2017). Manajemen Perumusan Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 181-195. <http://dx.doi.org/10.19105/tjpi.v12i2.1377>
- Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. 2016. "Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan :CosmoGov* 2(2): 220

- Irianisyah, S., Harapan, E., & Houtman, H. (2020). Supervisi Kepala Sekolah Dalam Penggunaan Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(3), 1-7
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Januar, I. 2006. *Globalisasi pendidikan di Indonesia*, (Online), ([www.friendster.com/group/tabmain.php?statpos=mygroup&gid=340151](http://www.friendster.com/group/tabmain.php?statpos=mygroup&gid=340151)),
- Lailatussaadah, L. (n.d.). , 'Upaya Peningkatan Kinerja Guru', *Intelektualita*, 3.1 (2015), 243106.
- Lailatussaadah, L., 'Upaya Peningkatan Kinerja Guru', *Intelektualita*, 3.1 (2015), 243106
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. . Yogyakarta: Samudra Biru.
- Madjid, ABD, *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Madrasah Aliyah Falah Arungkeke Kabupaten Jeneponto', *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8.1 (2019), 848–70 <
- Munir. (2010). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: PT Pustaka Insan MaqDani, Anggota IKPI.
- Slameto, Bambang S Sulasmono, and Krisma Widi Wardani, 'Peningkatan Kinerja Guru Melalui Pelatihan Beserta Faktor Penentunya', *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27.2 (2017), 38–47
- Sunanto, 'Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh', *Intelektualita : Kajian Pendidikan, Manajemen, Supervisi Kepemimpinan, Psikologi dan Konseling*, 3.1 (2015), 51-64 <<https://jurnal.ar-rainy.ac.id/index.php/intel/article/view/199>>
- Surya, M. (2002). *Dasar-dasar Kependidikan di SD*. . Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka.
- Wardoyo, C. 2007. *Urgensi Pendidikan Moral* (Online), (<http://www.nu.or.id>)